



Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia

Nasrullah Hidayat

Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
nasrullahhidayat816@yahoo.co.id

Diterima Februari 2013; Disetujui April 2013; Dipublikasikan Juni 2013

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan kebijakan kependudukan di Indonesia, metode yang digunakan dengan studi pustaka dan kajian literatur. Hasil penulisan menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi di bidang kependudukan di Indonesia adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya penyebaran dan struktur umur penduduk. Program kependudukan dan keluarga berencana bertujuan turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan pengendalian penduduk namun belum sepenuhnya berhasil. Evaluasi dan langkah dari kebijakan yang diambil guna mengatasi masalah kependudukan dalam ranah hukum sebenarnya telah sering terdengar, perubahan dasar hukum kependudukan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pun menjadi bukti perubahan kebijaksanaan dalam sisi hukum. Selain itu, Kebijakan pendidikan penting diterapkan karena berkenaan dengan pengaturan kehidupan dengan sesama manusia. Hal ini tersebut aspek dapat dilihat dari sosialitas dari keberadaan manusia.

Kata Kunci: Kependudukan; Kebijakan; Program

Abstract

This writing aims to examine the problems of population policy in Indonesia, the method used with literature study and literature review. The results of the study indicate that the main problem faced in the field of population in Indonesia is the still high population growth and the lack of balanced distribution and age structure of the population. Population and family planning programs aim to contribute to the creation of economic and social well-being for the whole community through the efforts of population planning and control but not yet fully successful. Evaluation and step of the policy taken to overcome the problem of population in the realm of law has been often heard, the basic change of population law from Law Number 10 Year 1992 into Law 52 year 2009 About Population Development and Family Development also become evidence of change of wisdom in Side of the law. In addition, an important educational policy is applied because it deals with the regulation of life with fellow human beings. This aspect can be seen from the sociality of human existence.

Keywords: Population; Policy; Program

How to Cite: Hidayat, N. (2013), Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia 1 (2): 24-36

*Corresponding author:

E-mail: nasrullahhidayat816@yahoo.co.id

P-ISSN-2549-9165

e-ISSN-2580-2011

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong perkembangan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. Dengan adanya pertumbuhan aspek-aspek kehidupan tersebut, maka bertambahnya sistem mata pencaharian hidup dari homogen menjadi kompleks. Berbeda dengan makhluk lain, manusia mempunyai kelebihan dalam kehidupan. Manusia dapat memanfaatkan dan mengembangkan akal budinya.

Pemanfaatan dan pengembangan akal budi telah terungkap pada perkembangan kebudayaan, baik kebudayaan yang bersifat rohaniyah, maupun kebudayaan kebendaan. Akibat dari kebudayaan ini telah mengubah cara berpikir manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pokok bahasan ini akan ditelaah mengenai pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, perkembangan kehidupan penduduk, dan timbulnya pranata-pranata akibat perkembangan tersebut.

Kebijakan Kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. sedangkan DR. Elibu Bergman (Harvard university) Mendefinisikan kebijakan penduduk sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dimana didalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk. Secara umum kebijakan penduduk harus ditujukan untuk:

1. Melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri terutama generasi yang akan datang.

2. Memberikan kemungkinan bagi tiap-tiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar, guna menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan diri, keluarga dan anaknya.

3. Kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri. Pemecahan masalah kependudukan dengan pengendalian kelahiran saja tidak

menjamin bahwa hasilnya secara otomatis akan meningkatkan kualitas hidup penduduk yang bersangkutan atau generasi yang akan datang. Pada tahun 1965 PBB mempunyai kebijakan kependudukan yang jelas dan menjadi dasar bagi tindakan-tindakan yang nyata, walaupun badan yang bernama "The Population Commission" dengan resmi sudah dapat disahkan pada tanggal 3 oktober 1946.

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan jumlah penduduk yang banyak. Dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang semakin tahun semakin meningkat. Dalam pengetahuan tentang kependudukan dikenal sebagai istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. (bahan kuliah dan makalah kesehatan)

Dibanding dengan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, Indonesia menempati urutan ketiga dalam jumlah penduduk setelah Cina dan India. Indonesia merupakan negara yang sedang membangun dengan mempunyai masalah kependudukan yang sangat serius disertai dengan, yaitu jumlah penduduk yang sangat besar disertai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan

modal, tetapi juga akan merupakan beban dalam pembangunan.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tentang aspek-aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, morbiditas, migrasi, ketenagakerjaan, perkawinan, dan aspek keluarga dan rumah tangga akan membantu para penentu kebijakan dan perencana program untuk dapat mengembangkan program pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat pada sasarannya.

Masalah utama yang dihadapi di bidang kependudukan di Indonesia adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangannya penyebaran dan struktur umur penduduk. Program kependudukan dan keluarga berencana bertujuan turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan pengendalian penduduk. Dengan demikian diharapkan tercapai keseimbangan yang baik antara jumlah dan kecepatan pertumbuhan penduduk dengan perkembangan produksi dan jasa.

Aktivis Sita Aripurnami menggunakan kutipan Zillah Eisenstein, *The Color of Gender* (1994) ini pada baris pertama tesis berjudul *Reproductive Rights Between Control and Resistance: A Reflection on the Discourse of Population Policy in Indonesia*, yang diajukan untuk mendapatkan Master of Science pada The Gender Institute, London School of Economics (LSE) London, Inggris. Sungguh kutipan yang tepat untuk menganalisis politik reduksionis dalam kebijakan kependudukan di Indonesia, yakni bagaimana kebijakan kependudukan direduksi menjadi kebijakan keluarga berencana; kebijakan berencana direduksi menjadi kebijakan kontrasepsi; kebijakan kontrasepsi direduksi lagi menjadi hanya

kontrasepsi bagi perempuan. Dari 20 jenis kontrasepsi yang beredar, 90 persen di antaranya ditujukan untuk perempuan.

Bank Dunia pernah menyebut Indonesia sebagai "salah satu transisi demografis paling mengesankan di negara sedang berkembang". Pada masa itu tingkat fertilitas turun dari 5,5 menjadi tiga per kelahiran, sementara tingkat kelahiran kasar turun dari 43 menjadi 28 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 1970, pertumbuhan penduduk turun dari sekitar 3,5 persen menjadi 2,7 persen dan turun lagi menjadi 1,6 persen pada tahun 1991. Banyak negara berkembang kemudian belajar implementasi program KB di Indonesia. Tetapi, hampir bisa dipastikan, dalam "transfer pengetahuan" itu tidak disebut metode yang membuat program itu sukses; yakni koersi (pemaksaan dengan ancaman) terhadap perempuan, khususnya dari kelompok masyarakat kelas bawah, terutama saat awal program diperkenalkan.

Di bawah panji-panji Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), program pengendalian penduduk (baca: KB dengan alat kontrasepsi) dilancarkan. Seperti halnya di negara berkembang lain awal tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru meyakini KB sebagai strategi ampuh mengejar ketertinggalan pembangunan. Ajaran Malthusian mengasumsikan, dengan jumlah penduduk terkendali rakyat lebih makmur dan sejahtera. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi-yang merupakan pereduksian makna "pembangunan"-tinggi guna mencapai kemakmuran, di antara syaratnya adalah "zero growth" di bidang kependudukan. Hubungan antara pengendalian jumlah penduduk dan pembangunan ekonomi menjadi semacam kebenaran, sehingga tidak lagi memerlukan pembuktian.

Dalam Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Cairo, Mesir, 1994, lembaga swadaya

masyarakat (LSM) mengungkapkan, kebijakan kependudukan yang reduksionis ini dikonstruksi sistematis melalui lembaga internasional. Pertumbuhan penduduk menjadi prakondisi bantuan pembangunan.

Di Indonesia, seperti pernah dikemukakan aktivis kesehatan reproduksi Ninuk Widyantoro, para petugas medis hanya diajari cara memasang susuk (nama lain dari Norplant), tetapi tidak cara mengeluarkannya. Pendarahan dan efek samping lain pemasangan kontrasepsi di tubuh perempuan sering dianggap tidak soal. Secara ironis pula, perencanaan program sebagian besar dilakukan laki-laki. Angka keberhasilan KB dijadikan salah satu komponen keberhasilan pembangunan, sehingga cara apa saja digunakan untuk mencapai "angka keberhasilan" itu. Manusia, khususnya perempuan, telah berubah maknanya menjadi hanya angka dan target.

Caranya, tak jarang menggunakan pemaksaan dan ancaman aparat. Penelitian Sita Aripurnami dan Wardah Hafidz awal tahun 1990-an memperlihatkan, hal itu terjadi pada pemasangan IUD di desa-desa. Rezim Orde Baru, seperti halnya rezim pembangunanisme di mana pun, memperlakukan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peledakan jumlah penduduk.

Dengan demikian, mereka harus dikontrol ketat. Sosiolog Ariel Heryanto pernah menyatakan, program KB telah membuat alat reproduksi perempuan seperti milik sah negara yang bisa digunakan para birokrat korup untuk mendapatkan utang. Pelajaran masa lalu ini amat berharga, karena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia salah satunya disebabkan persoalan KB. Ke depan, kebijakan kependudukan harus dikembalikan pada hakikatnya semula dengan menempatkan kesehatan reproduksi perempuan sebagai landasan. Itu berarti, perempuan mempunyai hak

mengontrol tubuhnya untuk bebas dari paksaan, kekerasan, serta diskriminasi pihak mana pun

Selama ini, masalah kependudukan boleh dikatakan masih kurang mendapat perhatian darimasyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat, Baik itu dari para politisi, tokoh agama, pakar ekonomi maupun tokoh masyarakat lainnya. Memang pada saat ini sebagian besar orang pada umumnya sudah tidak berkeberatan lagi dengan program untuk mengontrol kelahiran, tetapisayangnya masih kurang sekali kesadaran untuk melaksanakannya. Dianggap sebagai hal yang tidak penting.

Padahal, kalau kita mau menyadari, sebenarnya masalah kependudukan ini adalah masalah yang teramat penting. Tidak kalah pentingnya dengan berbagai macam masalah lainnya yang seringkali kita perdebatkan dalam berbagai seminar dan diskusi. Sebenarnya berkaitan erat dengan masalah ekonomi, hukum dan norma agama. Jadi, memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebenarnya, masalah kependudukan ini sudah bisa diatasi dengan baik bila saja sejak dulu sudah ada upaya yang sungguh-sungguh dari pihak pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Sayangnya, hal itu dulu masih belum ada. Dulu masih banyak orang yang menentang program KB. Kalau pun sudah ada yang menyetujuinya, umumnya mereka masih enggan melaksanakannya.

Pada zaman Orde Lama, dari pihak pemerintah pun tidak ada kesadaran akan masalah ini. Pada saat itu jumlah penduduk Indonesia masih berkisar 100 juta jiwa dan seandainya pada saat itu sudah ada upaya yang sungguh-sungguh tentunya tidak perlu penduduk Indonesia meledak seperti sekarang ini. Selain menimbulkan berbagai macam masalah sosial, jumlah penduduk yang semakin bertambah ini juga menimbulkan dampak

pada masalah yang lain, yaitu masalah lingkungan.

Selama ini, masalah kependudukan boleh dikatakan masih kurang mendapat perhatian darimasyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat. Baik itu dari para politisi, tokoh agama, pakar ekonomi maupun tokoh masyarakat lainnya. Memang pada saat ini sebagian besar orang pada umumnya sudah tidak berkeberatan lagi dengan program untuk mengontrol kelahiran, tetapisayangnya masih kurang sekali kesadaran untuk melaksanakannya. Dianggap sebagai hal yang tidak penting.

Padahal, kalau kita mau menyadari, sebenarnya masalah kependudukan ini adalah masalah yang teramat penting. Tidak kalah pentingnya dengan berbagai macam masalah lainnya yang seringkali kita perdebatkan dalam berbagai seminar dan diskusi. Dan sebenarnya berkaitan erat dengan masalah ekonomi, hukum dan norma agama. Jadi, memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebenarnya, masalah kependudukan ini sudah bisa diatasi dengan baik bila saja sejak dulu sudah ada upaya yang sungguh-sungguh dari pihak pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Sayangnya, hal itu dulu masih belum ada. Dulu masih banyak orang yang menentang program KB. Kalau pun sudah ada yang menyetujuinya, umumnya mereka masih enggan melaksanakannya.

Pada zaman Orde Lama, dari pihak pemerintah pun tidak ada kesadaran akan masalah ini. Pada saat itu jumlah penduduk Indonesia masih berkisar 100 juta jiwa dan seandainya pada saat itu sudah ada upaya yang sungguh-sungguh tentunya tidak perlu penduduk Indonesia meledak seperti sekarang ini. Hingga saat ini memang masih banyak orang yang menganggap bahwa teori yang dikemukakan oleh Malthus sudah tidak berlaku lagi karena adanya berbagai

macam kemajuan pada bidang pertanian yang bisa melipatgandakan jumlah makanan, tetapi mereka nampaknya melupakan bahwa kemajuan teknologi bukanlah hanya pada bidang pertanian, tetapi juga pada bidang kesehatan dan kedokteran.

Jadi, tingkat kematian menurun dengan cukup drastis sedangkan tingkat kelahiran tetap bertambah menurut primitif rate maka semakin sesaklah bumi kita ini dan semakin sulitlah memenuhi kebutuhan pangan karena tingkat pertumbuhan penduduk dunia yang sekitar 1,2 persen per tahun sedangkan lahan pertanian hanya bertambah 0.8 persen saja. Jumlah lahan ini pun semakin hari semakin berkurang saja karena semakin meningkatnya kebutuhan akan perumahan.

Apalagi, kita memang tak akan pernah bisa menciptakan teknologi yang bisa meningkatkan luas tanah di planet bumi. Jadi, hanya bila suatu saat kita memang telah bisa mendirikan koloni di planet Mars atau galaksi yang lain dan bisa pergi ke sana dengan ongkos setara naik kereta Purbaya barangkali kita tak perlu susah payah mengatasi masalah kependudukan ini. Jadi, prediksi Malthus, atau lengkapnya Thomas Robert Malthus (1766-1834), dalam hal ini memang bisa dikatakan cukup tepat dan tetap berlaku hingga saat ini. Dan teori Malthus tentang kependudukan yang ditulis dalam esainya yang berjudul " *Essay on the Principle of Population*" ini juga sebenarnya yang turut memberikan pengaruh yang sangat besar untuk meyakinkan Darwin tentang terjadinya proses seleksi alam dalam evolusi makhluk hidup. Malthus menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk adalah berdasarkan deret geometri (1, 4, 9, 16, ... dst.) sedangkan jumlah makanan hanyalah bertambah menurut deret aritmetika (1, 2, 3, 4, ... dst.).

Pengangguran yang semakin melimpah ruah ini pun pada akhirnya

menimbulkan banyak masalah juga karena orang yang tidak bekerja bukan berarti mereka lalu tidak makan. Mereka tetap makan juga dan banyak di antaranya yang kemudian terpaksa melakukan apa saja untuk menyambung hidupnya. Bila sebagian di antara mereka masih bersedia untuk menyambung hidup secara halal maka ternyata banyak juga di antaranya yang kemudian terpaksa harus dengan cara melanggar hukum dan norma agama sebab kebutuhan perut memang tak dapat ditunda sehari pun.

Bila kaum prianya banyak yang terjerumus melakukan kejahatan, maka kaum wanitanya banyak yang terperosok ke dalam prostitusi. Dan rasanya, tidak ada seorang pun yang bercita-cita untuk menjadi penjahat semasa kecilnya. Menurut sebuah penelitian, 95 persen wanita tuna susila sebenarnya juga ingin melakukan pekerjaan yang lain. yang halal, yang terhormat, yang baik-baik. Kalau ada. Yah, memang mana ada wanita yang semasa kecilnya pernah bercita-cita untuk menjadi pelacur. Cobalah tanya anak-anak kecil di kampung anda apa cita-cita mereka ketika dewasa kelak. Apakah ada yang bercita-cita untuk menjadi pelacur? Karena itu, kita memang tidak bisa memberantas kejahatan, tidak bisa memberantas pelacuran, bila rakyat kita masih didera kemiskinan. Tidak bisa hanya dengan menembaki setiap penjahat karena mereka akan tumbuh lagi. Tidak bisa hanya dengan beramai-ramai membakari kompleks prostitusi karena mereka akan mencari tempat yang lain lagi. Bukan pekerjaan yang lain karena memang tidak ada.

Apa yang harus kita lakukan memang memberantas penyebabnya, yaitu memberantas kemiskinan dan pengangguran. Salah satu cara memberantas kemiskinan dan pengangguran ini adalah dengan kontrol kelahiran sebab dengan kontrol kelahiran kita akan bisa dengan lebih mudah mengatasi kemiskinan karena akan

terdapat ruang yang cukup bagi semua orang untuk mencari makan. Dengan itu pula kita akan bisa dengan lebih mudah mengatasi pengangguran karena kita memang akan bisa lebih mudah pula mengupayakan agar pertumbuhan angkatan kerja senantiasa sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Bisa mengupayakan agar setiap orang bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak sehingga ia tidak akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum maupun norma agama.

Dengan tersedianya pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi setiap orang, maka dengan demikian kita telah bisa memberantas kejahatan tanpa harus menembaki setiap penjahat. Bisa membasmi pelacuran tanpa harus membakar setiap kompleks prostitusi. Kita juga tidak lagi akan diresahkan oleh ulah para pemuda pengangguran yang nongkrong disudut-sudut jalan sambil bermabuk-mabukan. Mengompas orang yang kebetulan lewat. Juga tak perlu lagi diresahkan oleh ulah "pak ogah" atau anak-anak jalanan yang sekedar mencari uang logam di setiap perempatan jalan. Mereka semua tidak akan ada bila mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Mereka akan hidup tenang tentram di rumah bersama keluarganya, bersama istri dan anak-anaknya, bersama saudara dan keluarganya tanpa harus mencari mangsa atau mengganggu orang lain di jalan-jalan

Selain menimbulkan berbagai macam masalah sosial, jumlah penduduk yang semakin bertambah ini juga menimbulkan dampak pada masalah yang lain, yaitu masalah lingkungan. Semakin banyak penduduk berarti semakin banyak areal persawahan dan hutan yang berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk. Bila tadi sudah dibahas bagaimana jumlah penduduk yang semakin bertambah ini menyebabkan urbanisasi dan menimbulkan berbagai masalah sosial di kota-kota, maka kali ini kita bisa melihat

bagaimana mereka yang tinggal menetap di desa pun menimbulkan masalah lain yang tak kalah seriusnya, yaitu kehancuran hutan yang ada, termasuk juga hutan lindung yang mesti dijaga.

Meski demikian, ini bukanlah berarti bahwa perusakan hutan oleh perusahaan raksasa kemudian kita abaikan begitu saja sebab jumlah 20 hingga 40 persen dari ratusan juta hektar bukanlah jumlah yang sedikit. Bila dibiarkan, maka lama-lama pun akan bisa menghancurkan seluruh hutan yang ada. Kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh penebangan yang semakin menjadi-jadi, baik oleh penduduk lokal maupun perusahaan besar, selain mengakibatkan apa yang telah disebutkan diatas, juga akan bisa menyebabkan banjir, tanah longsor serta endapan lumpur. Di Serawak misalnya, erosi telah menyebabkan endapan lumpur mencemari dua pertiga sungai di sana. Lenyapnya hutan tropis ini juga berarti tidak akan ada lagi paru-paru dunia yang bisa menyerap polusi yang semakin melimpah, yang pada saat ini sebagian terbesar adalah hasil sumbangan dari negara-negara industri maju.

Kelak ditambah dengan semua negara yang ada di dunia sebab semua negara-negara berkembang memang bercita-cita ingin menjadi negara industri besar. Besar-besaran kalau perlu, meski dengan gaji pekerja cukup kecil-kecilan saja. Pada akhirnya, kerusakan hutan ini juga akan bisa memusnahkan jutaan spesies flora dan fauna yang ada, termasuk juga tanaman yang bisa bermanfaat bagi obat-obatan. Tak sampai 30 tahun lagi, pada tahun 2020 diperkirakan sepersepuluh sampai seperlima dari 10 juta spesies tanaman dan tumbuhan akan musnah sebab 50 persen dari spesies itu hidup di hutan-hutan tropis yang terus digero-goti. Sekali sebuah spesies musnah, ia akan musnah untuk selamanya.

Bagi peminat ilmu alam, hal seperti ini akan bisa membuatnya merasa berduka. Barangkali perkataan Nietzsche memang benar adanya. Dunia ini begitu indah, demikian katanya suatu ketika, tetapi ia mempunyai wabah yang sangat berbahaya: manusia. Selain mengakibatkan kehancuran hutan yang ada, penambahan penduduk yang semakin tak terkendali juga akan bisa mengakibatkan pencemaran yang luar biasa pada pantai dan lautan. Kini tamasya laut bukan lagi janji kenyamanan. Mereka yang dekat dengan pantai tahu bahwa kini laut-laut begitu jorok, dipenuhi sampah plastik, dan ikan-ikan lenyap. Sebenarnya, tumpahan minyak, limbah pabrik dan sampah kota cuma masalah yang kasat mata. Ancaman utama untuk laut, 70 sampai 80 persen dari seluruh polusi bahari adalah sedimen dan pencemaran yang mengalir ke laut dari sumber daratan, seperti lapisan tanah teratas, pupuk, pestisida dan segala bentuk buangan industri. Terumbu karang, khususnya, amat rawan terhadap sedimen.

Kini karang yang menyedikan rumah bagi sebagian besar spesies ikan di dunia di sepanjang Asia, Australia dan Karibia mulai berkurang. Jadi, pertumbuhan penduduk yang tak terkendali ini memang bisa menyebabkan berbagai masalah dalam berbagai bidang kehidupan. Mengenai pencemaran pada lautan ini adalah suatu hal yang rasanya mengkhawatirkan mengingat dua pertiga negeri kita ini adalah terdiri dari lautan. Terlebih lagi lautan sebenarnya menyimpan kekayaan yang selama ini belum ter eksploitasi sepenuhnya. Ikan-ikan kita sebagian besar membusuk di lautan tanpa sempat dikail nelayan.

Kebijakan publik adalah komitmen politik pemerintah berlandaskan hukum, dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosiologis. Pemikiran hukum dalam arti jurispruden memfokuskan kebijakan publik sebagai aturan. Aturan ini

merupakan produk yang terkodifikasi. Proses hukum berlangsung ditata dan diatur oleh logika sistem hukum, dan dilihat sebagai sesuatu yang mekanis. Kebijakan publik sebagai produk hukum menggambarkan harapan, dan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Secara sosiologis pelaksanaan kebijakan publik harus diperhatikan struktur sosialnya yang selalu berubah. Oleh sebab itu kebijakan publik juga perlu mementingkan perhatiannya pada adanya keragaman, keunikan di masyarakat (Black, 1976; dan Milovanovich, 1994).

Model pemikiran hukum dan sosiologis tentang kebijakan publik merupakan pemahaman terhadap realitas sosial, dimana pembuatan, pemberlakuan dan pelaksanaan kebijakan publik harus mendasarkan dan mempertimbangkan pemikiran-pemikiran tersebut. Hal itu dilakukan agar tujuan utama dari kebijakan tersebut dapat dicapai secara optimal. Kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan, sebagai dasar pelaksanaan, sekaligus tujuan (sasaran) dan pengguna hasil-hasil yang dicapai. Sebagai dasar pelaksanaan terkait dengan dasar kebijakan pembangunan.

Dinamika kependudukan berpengaruh pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Ukuran tingkat dinamikanya digunakan penanda atau indikator yang terukur yang bisa dibaca, digunakan, dibanding bagi kepentingan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, misalnya: tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, kematian, tingkat (angka) kematian bayi, angka harapan hidup, tingkat kematian ibu dan sebagainya. Ketersediaan indikator kependudukan, tingkat pemahaman konseptual, terutama penggunaannya oleh pihak-pihak penyusunan dan pengelola pembangunan (contohnya: di bidang kesehatan) sangat berarti bagi rumusan kebijakan dan pelaksanaannya.

Evaluasi dari kebijakan publik guna mengatasi masalah kependudukan dalam ranah hukum sebenarnya telah sering terdengar, perubahan dasar hukum kependudukan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pun menjadi bukti perubahan kebijaksanaan dalam sisi hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi dan yang perlu disoroti yakni :Visi dan arah dari pembangunan kependudukan perlu diperjelas. Sebelum ini arah kebijakan dan program-program kependudukan lebih banyak porsinya pada target kuantitatif, sehingga seolah merupakan harga mati untuk mencapai angka yang ditargetkan, hal ini berimbas pada pelaksanaan di lapangan yang kurang down to earth dan simpatik pada sasaran program (masyarakat), kini arahnya seharusnya dirubah dari target kuantitatif menjadi target kualitatif (penduduk yang berkualitas),

Penduduk yang menjadi sasaran program seringkali tidak tahu kemana kebijakan yang membawa mereka berarah, pasalnya informasi dan transparansi publik dalam hal kependudukan kurang bisa diakses oleh kebanyakan orang, hanya terbatas pada pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat saja. Apabila sanggup pun, data yang disajikan tidak begitu dan berkualitas, Badan Pusat Statistik yang kualitasnya dipercaya pun hanya mampu memberikan data dalam kala waktu tertentu, oleh karenanya, lembaga pemerintah seperti BKKBN seharusnya lebih mampu meningkatkan kualitas informasinya,

Perlunya reformasi birokrasi dalam hal kependudukan, sebelumnya banyak program dari lembaga pemerintah yang bergerak dalam ranah yang sama, hal ini kontan membuar masyarakat bingung. Badan seperti Bappenas, BKKBN, dan beberapa departemen lain seharusnya

membuat program yang tidak tumpang tindih sehingga dapat berjalan efektif. Perlunya keserasian kerja antara daerah dan pusat, tidak hanya itu, hal ini juga dituntut efektif pada tingkat pemerintah desa dan daerah. Hal ini dimaksudkan agar program-program yang secara filosofis telah sempurna pada tingkat pusat, dapat dihantarkan dengan baik pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah desa tanpa ada reduksi. Perhatian terhadap isu lama yang belum terselesaikan seharusnya lebih diutamakan, seperti isu perempuan, penduduk usia lanjut, penduduk miskin, dsb. Tentunya hal tersebut menjadi faktor penting mortalitas.

Khusus mengenai mortalitas, hal yang dipahami sejak awal yakni penurunan angka mortalitas dengan berbagai caranya merupakan suatu hak asasi manusia, artinya, usaha penurunan angka tersebut merupakan arahan kebijakan publik yang sesungguhnya disamping usaha penekanan jumlah penduduk.

Diharapkan tidak saja fokus pada penekanan jumlah penduduk, namun tidak memperhatikan tingkat kematian penduduk, pemerintah harus menyediakan program yang menjamin hak-hak tersebut, antara lain dengan jaminan kesehatan hingga ke pelosok daerah, penyediaan informasi demografi dan kesehatan yang memadai dan mudah diakses, serta pelayanan pascapenanganan. Usaha-usaha tersebut diharapkan mampu menjadi penurunan angka kematian penduduk di Indonesia.

Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi sering kali tidak kita pahami sepenuhnya. Pendidikan sudah dikenal sejak manusia lahir ke dunia ini karena dia lahir dari seorang ibu yang secara instingtif akan melindungi dan mengajari anaknya sehingga menjadi dewasa. Di dalam masyarakat modern atau yang telah maju,

proses pendidikan tidak dapat lagi dilakukan secara terbatas oleh sang ibu atau keluarganya maupun masyarakat sekitarnya.

Pendidikan telah menjadi tugas bersama di dalam masyarakat, sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat berjalan secara formal. Di dalam melaksanakan tugas pendidikan tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan itu dapat tercapai. (H.A.R. Tilaar, 2008: 16-18). Kebijakan pendidikan itu berkenaan dengan pengaturan kehidupan dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia.

Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan tidak terlepas daripertanyaan mengenai apakah manusia itu atau apakah hakikat manusia itu. Selanjutnya jawaban terhadap hakikat manusia akan membawa kita kepada pertanyaan apakah sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini dan bagaimana manusia itu dapat mewujudkan tujuan tersebut. Pengertian yang tepat mengenai hakikat proses pendidikan itu akan melahirkan berbagai kebijakan pendidikan. Salah satu makna dari proses pendidikan ialah melihat pendidikan sebagai salah satu proses pemberdayaan. (H.A.R. Tilaar, 2008: 18-19). Pemberdayaan diartikan sebagai usaha meningkatkan peran dan fungsi suatu sumber daya (Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM)) menuju pemanfaatan yang tidak sia-sia (mubadzir secara duniawi dan ukhrowi). Sehingga pemberdayaan merupakan kegiatan yang terpadu antara berbagai unsur satuan organisasi serta berbagai aspek kegiatan ber-penghidupan kedunian dan akherat. Dalam dunia pendidikan pemuda sarjana merupakan salah satu SDM yang dapat diberdayakan. Melalui

program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3), pemuda sarjana dapat membantu mengembangkan potensi masyarakat desa terutama pemuda desa. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian kelima pasal 26 ayat 3 disebutkan, bahwa : “pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”

Di sinilah peran serta pemuda sarjana untuk memberikan pelayanan pendidikan kepemudaan bagi masyarakat desa terutama pemuda desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa “pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.”

Pelayanan kepemudaan yang diberikan pemuda sarjana dalam tugasnya menggerakkan, mendampingi dan melakukan capacity building, serta menciptakan kemandirian berbentuk kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat terutama pemuda desa. Adapun kegiatan-kegiatannya seperti pelatihan kepemimpinan bagi kaum muda, mengembangkan usaha mandiri yang dijalankan masyarakat dengan melibatkan pemuda desa, membantu meningkatkan kinerja pelayanan publik oleh Pemerintah Desa, dan yang lainnya.

Dalam tugasnya menggerakkan dan mendampingi masyarakat di pedesaan, para pemuda sarjana perlu untuk mengembangkan potensi dirinya untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Menurut pandangan Theodore W. Schultz (H.A.R Tilaar, 1990: 102) antara lain mengatakan “*mankind’s future is not foreordained by space, energy, and cropland. It will be determined by intelligent evolution of humanity*”. Selanjutnya ia berpendapat bahwa investasi dalam usaha memperbaiki kualitas penduduk akan memberi sumbangan yang sangat besar bagi prospek ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan perekonomian suatu Negara memang sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusianya, yaitu jumlah serta tingkat keterampilannya, pandangan budaya, sikapnya terhadap kerja, dan keinginannya meningkatkan diri. Tingkat keterampilanpun sangat menentukan kemampuan untuk dapat mengubah struktur produksi dan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan yang diinginkan.

Dalam sejarah ilmu pendidikan dikenal pendapat yang ekstrim bahwa pendidikan bertujuan kepada pendidikan itu sendiri sampai kepada pendapat ekstrim lainnya yang mengatakan bahwa pendidikan selalu diarahkan kepada tujuan yang eksternal. Dari kedua pendapat yang ekstrim ini, tujuan pendidikan sebagai pengembangan SDM adalah pengembangan potensi yang ada pada masing-masing individu yang diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup individu sebagai perorangan dalam hubungannya dengan bermasyarakat. Setiap hidup bermasyarakat mempunyai tujuannya masing-masing, di dalam suatu lingkungan budaya dan lingkungan hidup tertentu dan akhirnya terkait dalam suatu kehidupan kemanusiaan. (H.A.R. Tilaar, 1990: 103-104).

Dalam kehidupan bermasyarakat kita sebagai manusia yang mempunyai keterampilan memang harus mampu mengembangkan diri kita sendiri, dan juga mampu membangun masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas masyarakat terutama pemuda desa, dalam menumbuhkan perekonomian desa menjadi lebih baik. Para pemuda sarjana sebagai manusia penggerak, pendamping, dan pembangun di pedesaan dalam tugasnya tersebut, harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu untuk mengembangkan SDA dan SDM di pedesaan. Beberapa program yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan kependudukan sebagai berikut :

1. Keluarga berencana

Keluarga berencana merupakan usaha pokok di dalam kebijaksanaan kependudukan umumnya dan usaha menurunkan tingkat kelahiran khususnya. Usaha menurunkan kelahiran melalui keluarga berencana sekaligus dikaitkan dengan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Sasaran usaha keluarga berencana adalah seluruh lapisan masyarakat dan jangkauan daerah usaha keluarga berencana diperluas ke daerah luar Jawa dan daerah pedesaan. Tujuan usaha keluarga berencana bukan hanya memperbanyak jumlah akseptor tetapi mempertahankan agar keluarga-keluarga penerima tetap melaksanakan keluarga berencana. Oleh karena berhasilnya keluarga berencana pada akhirnya akan ditentukan oleh kesadaran pada masing-masing keluarga, maka cara yang ditempuh dalam keluarga berencana akan menekankan bukan hanya cara-cara klinis tetapi juga cara-cara nonklinis. Selanjutnya kegiatan pembangunan di dalam berbagai bidang diserasikan agar dapat menunjang pelaksanaan keluarga berencana. Kegiatan ini mencakup pendidikan dan pendidikan kependudukan, motivasi ke arah keluarga

kecil, dan menurunkan angka kematian anak-anak.

2. Pendidikan dan pendidikan kependudukan

Intensifikasi pendidikan baik formal maupun nonformal akan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai masalah penduduk dan pentingnya pelaksanaan keluarga berencana. Tetapi untuk lebih menyebarluaskan informasi mengenai kependudukan maka pendidikan kependudukan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan dan mencakup lembaga pendidikan guru, pendidikan tingkat sekolah menengah dan pendidikan orang dewasa. Para lulusan sekolah menengah dan orang dewasa amat memerlukan informasi mengenai kependudukan oleh sebab mereka inilah yang akan membentuk keluarga dalam waktu relatif singkat.

Usaha untuk memberikan motivasi ke arah tercapainya keluarga kecil dengan jumlah anak yang sedikit ditingkatkan. Dalam hubungan ini pemberian tunjangan keluarga dan kelonggaran lainnya di dalam sistem penggajian, pajak dan lain-lain, akan ditinjau dan disesuaikan dengan kebijaksanaan kependudukan. Selanjutnya sistem jaminan sosial terutama untuk hari tua setahap demi setahap mulai ditingkatkan. Peningkatan sistem jaminan sosial ini penting oleh sebab masih luasnya pandangan bahwa banyak anak berarti banyak rezeki.

Salah satu motivasi untuk mempunyai jumlah anak yang banyak ialah bahwa anak merupakan sumber untuk meningkatkan pendapatan bagi keluarga berpendapatan rendah. Banyaknya anak yang tidak meneruskan sekolah adalah keadaan yang timbul oleh sebab rendahnya pendapatan orang tua mereka dan anak-anak ini dibutuhkan untuk dapat sekedar menambah pendapatan keluarga. Semakin tinggi

tingkat kematian dikalangan anak dan bayi semakin besar pula kebutuhan akan tingkat kelahiran yang tinggi.

Semakin banyak anak-anak yang lahir dan hidup dan mencapai umur dewasa semakin kecil kebutuhan untuk jumlah kelahiran yang besar. Oleh karena itu usaha untuk lebih meratakan hasil pembangunan akan menunjang usaha keluarga berencana di dalam menurunkan angka kela-hiran. Selanjutnya usaha-usaha di bidang kesehatan umumnya dan usaha meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan menu-runkan angka kematian anak khususnya merupakan bagian daripada ikhtiar menurunkan tingkat kelahiran.

Tujuan program kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

1. mengembangkan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja dan menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja, termasuk advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan konseling bagi masyarakat, keluarga, dan remaja.
2. memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri

KESIMPULAN

Perlunya reformasi birokrasi dalam hal kependudukan, sebelumnya banyak program dari lembaga pemerintah yang bergerak dalam ranah yang sama, hal ini kontan membuar masyarakat bingung. Badan seperti Bappenas, BKKBN, dan beberapa departemen lain seharusnya membuat program yang tidak tumpang

tindih sehingga dapat berjalan efektif. Perlunya keserasian kerja antara daerah dan pusat, tidak hanya itu, hal ini juga dituntut efektif pada tingkat pemerintah desa dan daerah. Hal ini dimaksudkan agar program-program yang secara filosofis telah sempurna pada tingkat pusat, dapat dihantarkan dengan baik pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah desa tanpa ada reduksi. Perhatian terhadap isu lama yang belum terselesaikan seharusnya lebih diutamakan, seperti isu perempuan, penduduk usia lanjut, penduduk miskin, dsb. Tentunya hal tersebut menjadi faktor penting mortalitas.

Dinamika kependudukan berpengaruh pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Ukuran tingkat dinamikanya digunakan penanda atau indikator yang terukur yang bisa dibaca, digunakan, dibanding bagi kepentingan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, misalnya: tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, kematian, tingkat (angka) kematian bayi, angka harapan hidup, tingkat kematian ibu dan sebagainya. Ketersediaan indikator kependudukan, tingkat pemahaman konseptual, terutama penggunaannya oleh pihak-pihak penyusunan dan pengelola pembangunan (contohnya: di bidang kesehatan) sangat berarti bagi rumusan kebijakan dan pelaksanaannya.

Evaluasi dari kebijakan publik guna mengatasi masalah kependudukan dalam ranah hukum sebenarnya telah sering terdengar, perubahan dasar hukum kependudukan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pun menjadi bukti perubahan kebijaksanaan dalam sisi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ananta Aris, 1995. Kesehatan di indonesia. Jakarta :Kantor

- Kementerian Kependudukan/
BKKBN
<http://www.radarlampung.co.id/read/society/37821-kesehatan-masyarakatprioritas-utama>
<http://usepmulyana.files.wordpress.com/2009/02/konsepsi-dan-kebijakan-pelayanan-pelayanan-publik-compatibility-mode.pdf>
<http://www.republika.co.id/berita/video/ficer/13/05/31/-tingkatkan-kualitas-hidup>
<http://www.unpad.ac.id/2013/02/kualitas-hidup-seseorang-terlihat-dari-interaksidengan-kehidupan-di-sekitarnya/>
- Kevin White, 2008. Sosiologi Kesehatan dan Penyakit . Jakarta : Rajawali Pers
- Notoatmodjo, 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan . Jakarta : Rineka Cipta
- Siasah M., Muhsinatun, dkk. 2002. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: UPT MKU UNY
- Soejani,dkk. 2008. Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan. Jakarta : Universitas Indonesia